



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 73 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

SPKOB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk meminjang kelancaran tugas operasional sehari-hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda empat dan dua ;

b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu memunjuk seorang Pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;

c. bahwa untuk menunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab terhadap kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MEINGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pe laksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057 - tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk kendaraan bermotor roda empat sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan se bagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas se bagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab dalam pengurusan serta pemeliharaan terhadap kendaraan roda empat dan dua sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Koputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan - untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 17 MARET 1993



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol - Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Bendaharawan Umum Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 73 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 MARET 1993

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DAN DUA MILIK PEMERINTAH
TAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Jenis Kendaraan	Merk	No. m o r	Tahm Pem	Wilayah Kerja	Penanggung	Keterangan
1.	1	Rangka	1	Lesin	1	Jawab	
1.	1	2	1	3	1	9	
1.	1	2	1	4	1	10	
1.	1	2	1	5	1		
1.	1	2	1	6	1		
1.	1	2	1	7	1		
1.	1	2	1	8	1		
1.	1	2	1	9	1		
1.	1	2	1	10	1		
1.	Dump Truck	Isuzu	25917837	P. 928528	B. 9350 UT	1992	Dinas Operasional Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah - an dan Pertamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - rah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sepeda Motor	Honda Win	HA 230 -04067	HAE-2103655	AG.9705 TB	1992	Dinas Operasional Bagian Umum & Protokol (Penyataan Inventarisasi Barang Daerah dan Pelaksanaan Sensus Barang Daerah tahun 1993)



DRS. IBNU SALAM